

SALINAN

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 123 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 112 TAHUN 2022
TENTANG TIM NARAHUBUNG REFORMASI BIROKRASI DAN
AGEN PERUBAHAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya pembaruan daftar Tim Narahubung Reformasi Birokrasi dan Agen Perubahan, sehingga diperlukan penyempurnaan terhadap daftar nama Tim Narahubung Reformasi Birokrasi dan Agen Perubahan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 112 Tahun 2022 tentang Tim Narahubung Reformasi Birokrasi dan Agen Perubahan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 112 TAHUN 2022 TENTANG TIM NARAHUBUNG

REFORMASI BIROKRASI DAN AGEN PERUBAHAN
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH.

KESATU : Lampiran dalam Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 112 Tahun
2022 tentang Tim Narahubung Reformasi Birokrasi dan
Agen Perubahan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah diubah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2022

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

ABDULLAH AZWAR ANAS

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,


Suharti



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR
112 TAHUN 2022 TENTANG TIM
NARAHUBUNG REFORMASI
BIROKRASI DAN AGEN PERUBAHAN
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 123 TAHUN 2022

TANGGAL : 1 APRIL 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM NARAHUBUNG REFORMASI BIROKRASI
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Kedudukan dalam Tim	Nama/Jabatan	Unit Organisasi
Pengarah	Sekretaris Utama	Sekretariat Utama
Ketua	Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
Anggota		
	1 Mahfuzan Zakaria	Biro Perencanaan dan Keuangan
	2 Sulmiari	Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum
	3 Yudi Prasetiawan	
	4 Dianita Asni	

Kedudukan dalam Tim	Nama/Jabatan	Unit Organisasi
5	Ivana Suprpto	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
6	Ahmad Khairunnas	
7	Cherish Shery Desarya	
8	Yohanes Chrisostomus Catur Pamungkas	Inspektorat
9	Setiaji Santoso	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa
10	Eva Sinaga	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
11	Yasmine Permata Sari	
12	Larasati Aisyah Retno Anjani	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus
13	Rahmat Fitriadi Herman	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
14	Iswan Huntoyungo	Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan
15	Muhamad Yusuf Chandra Nugraha	
16	Desi Kartika	Direktorat Pengembangan Sistem Katalog
17	Vialita Octaviani	Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
18	Rizky Dwi Raharjo	

Kedudukan dalam Tim	Nama/Jabatan	Unit Organisasi
19	Inggarrestu Pradiptaningtyas	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan
20	Firdo Budi Prasetyo	
21	Muhammad Ardian Wibowo	Direktorat Sertifikasi Profesi
22	Lutfi Prafidya Ferisa	Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat
23	Nida Mufidah Anggraini	
24	Yustitia Fernando	Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah
25	Mei Rini Nainggolan	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR
112 TAHUN 2022 TENTANG TIM
NARAHUBUNG REFORMASI
BIROKRASI DAN AGEN PERUBAHAN
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 123 TAHUN 2022

TANGGAL : 1 APRIL 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN AGEN PERUBAHAN
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No	Nama	Unit Organisasi
1.	Ranto	Biro Perencanaan dan Keuangan
2.	Wildan Massani	Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum
3.	Rinaldi Morintosh	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
4.	Himawan Aditya Perdana	Inspektorat
5.	Tri Susanto	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaaan Barang/Jasa
6.	Antonius Lambok Sihombing	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
7.	Dwi Satrianto	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus
8.	Yuyu Yulianti	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional

No	Nama	Unit Organisasi
9.	Heldi Yudiyatna	Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan
10.	Erlangga Aninditya	Direktorat Pengembangan Sistem Katalog
11.	Fajar Adi Hemawan	Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
12.	Ria Agustina Nasution	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan
13.	Windy Dian Trisari	Direktorat Sertifikasi Profesi
14.	Harry Sri Kahartan Kusuma Wijaya	Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat
15.	Eko Rinaldo Octavianus	Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah
16.	Arif Budiman Anwar	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

ABDULLAH AZWAR ANAS